

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Oleh :

**SYAFIRA YULIA
160412076**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

SYAFIRA YULIA

160412076

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO.01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAFIRA YULIA
160412076**

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 05 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

RinaAndriani, SE.,M.Si
NIDN.1003058501

Dessy Kumala Dewi, SE., M. Ak
NIDN.1006068503

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singgingi

Yul Emri Yulis, SE.,M.Si
NIDN. 1014038901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	SYAFIRA YULIA
NPM	:	160412076
Program Studi	:	AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI KEUANGAN
Fakultas	:	ILMU SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 05 September2020
Yang membuat pernyataan,

SYAFIRA YULIA
NPM.160412076

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul, **“Analisis Penerapan PSAP No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahummashalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi (UNIKS). Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun bagi pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik dari segi materi maupun penulisannya.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis.,MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singgingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE.,ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi.

3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Penasehat Akademis (PA).
4. Ibu **Rina Andriani, SE.,M.Si** selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi terima kasih atas bantuannya.
7. Kasubbag keuangan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data serta informasi yang penulis perlukan hingga selesainya skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada Ibunda tercinta **Warni Puspita Sari** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Serta untuk Saudara, Oom, dan Tante penulis terimakasih telah banyak memberi bantuan semangat dan motivasi. Semoga penulis mampu menjadi apa yang kalian harapkan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas semangat dan kerjasama selama ini, bahu-membahu saling membantu satu sama lain, senda gurau saling menghibur dikala

bersama. Khususnya teman-teman Akuntansi A angkatan 2016 semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia dan pasti akan kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada Negara, Bangsa, dan Agama.

Akhir kata penulis mengucapkan *Alhamdulillah*, Semoga bantuan dan do'a yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Teluk Kuantan, 5 September2020

SYAFIRA YULIA
NPM.160412076

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Syafira Yulia
Rina Andriani
Dessy Kumala Dewi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 (PSAP No.01) dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan teori yang sudah ada dengan praktek sesungguhnya. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dari bulan Juni hingga Agustus 2020 dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan PSAP No. 01 secara penuh. Terdapat lima komponen laporan keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci : Penerapan PSAP, Laporan Keuangan, Pemerintah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PSAP NO. 01 CONCERNING PRESENTATION OF THE GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS AT THE DEPARTMENT OF YOUTH AND SPORT EDUCATION, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

**Syafira Yulia
Rina Andriani
Dessy Kumala Dewi**

This study aims to determine the suitability of the application of the Government Accounting Standard Statement Number 01 (PSAP No. 01) in the Presentation of Financial Statements at the Youth and Sports Education Office of Kuantan Singingi Regency for the 2019 period. The method used in this research is comparative descriptive, which aims to compare theories. which already exists with actual practice. This research was conducted at the Youth and Sports Education Office of Kuantan Singingi Regency from June to August 2020 using the interview, observation and documentation methods.

The results showed that in presenting the financial statements, the Department of Youth and Sports Education, Kuantan Singingi Regency had implemented PSAP No. 01 in full. There are five components of financial reports that are presented including Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Change in Equity Report, and Notes to Financial Statements.

Keywords: PSAP Implementation, Financial Statements, Governance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	9
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah.....	13

2.1.3 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah	15
2.1.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah.....	19
2.1.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.....	22
2.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah.....	42
2.1.7 Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor publik	46
2.2 Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pemikiran	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	51
3.2 Tempat dan Waktu.....	52
3.3 Populasi dan Sampel	52
3.3.1 Populasi.....	52
3.3.2 Sampel	53
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Metode Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	57
4.1.1 Gambaran umum Disdikpora.....	57
4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah	61
4.2.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan yang Ada	62

4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Disdikpora Kab. Kuansing	71
4.3 Pembahasan	95
4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran	95
4.3.2 Neraca	97
4.3.3 Laporan Operasional	100
4.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas	103
4.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi.....	4
2.1 Kandungan PP SAP No. 71 Tahun 2010.....	12
2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	24
2.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	29
2.4 Neraca (N)	30
2.5 Laporan Operasional (LO)	33
2.6 Laporan Arus Kas (LAK)	36
2.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	40
2.8 Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dan Swasta	46
2.9 Penelitian Terdahulu	47
3.1 Waktu Penelitian	52
4.1 Penyajian Laporan Keuangan Disdikpora Kab. Kuansing	72
4.2 Laporan Realisasi Anggaran Disdikpora Kab. Kuansing	74
4.3 Neraca Disdikpora Kab. Kuansing.....	78
4.4 Laporan Operasional Disdikpora Kab. Kuansing	85
4.5 Laporan Perubahan Ekuitas Disdikpora Kab. Kuansing	92
4.6 Analisis Penulis Terhadap Perbandingan Unsur-unsur Laporan Keuangan yang ditetapkan PSAP dengan unsur-unsur laporan keuangan pada Disdikpora Kab. Kuansing	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Pemikiran	
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Wawancara	
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Disdikpora Kab. Kuansing 2019	
Lampiran 3 Neraca Disdikpora Kab. Kuansing 2019	
Lampiran 4 Laporan Operasional Disdikpora Kab. Kuansing 2019	
Lampiran 5 Laporan Perubahan Ekuitas Disdikpora Kab. Kuansing 2019	
Lampiran 6 Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset	
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi	
Lampiran 8 Biodata	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah semakin gencar mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dikenal dengan nama *good governance*. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan upaya-upaya reformasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (Suwanda, dadang dan Hendri Santosa 2014:34).

Laporan keuangan merupakan alat yang paling penting untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dari instansi pemerintahan. Menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan instansi pemerintahan adalah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut. Laporan keuangan juga dapat menunjukkan kinerja dari instansi yang bersangkutan. Laporan keuangan instansi pemerintah, dalam hal ini instansi pemerintah daerah juga bermanfaat bagi banyak pihak, misalnya pemerintah pusat, kepala dinas dari instansi pemerintah yang bersangkutan, pegawai, masyarakat, dan sebagainya (Mardiasmo, 2010:200).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang handal dan relevan yaitu dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis kasyaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan ini lebih mengarah pada penggunaan basisakrual pada laporan keuangan. Dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar *good governance* dapat terwujud.

Setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Laporan keuangan berdasarkan SAP dinyatakan dalam PSAP No. 01 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kuantan Singgingi. Sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singgingi.

Terkait dalam hal penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan, salah satu tantangan yang mempengaruhi penerapan SAP adalah pemerintah daerah harus memiliki sumberdaya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Sedangkan Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan software akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan Standar Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ira Maya Sandi selaku Staf Keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi, maka penulis mendapatkan informasi yaitu pada Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam penyajian Laporan Keuangannya sejak tahun 2015 sudah menggunakan basis akrual. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyajian laporan keuangan menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan, dalam hal ini telah sesuai dengan PSAP No. 01. Beliau juga memaparkan bahwa ada beberapa kendala dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan. Diantaranya adalah minimnya SDM sebagai penyusun laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan dari bidang akuntansi. Selain itu teknologi informasi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi juga masih kurang memadai. Seperti koneksi internet yang buruk dan ketersediaan perangkat seperti laptop, komputer, printer dan perangkat keras lainnya yang kurang canggih. Sehingga dapat menghambat dalam proses menyajikan laporan keuangan.

Berikut data Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Laporan	2019	2018
1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	471.430.984.732,00	-
2	Neraca	558.189.509.280,91	478.134.424.045,91
3	Laporan Operasional	393.438.857.290,00	-
4	Laporan Perubahan Ekuitas	556.024.237.787,91	956.064.220.691,82

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode berakhir 31 Desember 2019 diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Laporan Realisasi Anggaran, berdasarkan laporan ini realisasi belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp. 471.453.484.732,00 atau 85,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 548.252.137.093,74 dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
2. Neraca, diinformasikan bahwa nilai aset Dinas Pendidikan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 558.189.509.280,91. Kewajiban sebesar Rp. 2.165.271.493,00 sehingga ekuitas dana Tahun 2019 adalah Rp. 556.024.237.787,91.
3. Laporan Operasional, menyajikan informasi tentang pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit-LO, yang mana pendapatan LO adalah sebesar Rp. 22.500.000,00, beban sebesar Rp. 393.461.357.290,00 sehingga terdapat surplus/defisit-LO sebesar Rp. 393.438.857.290,00;
4. Laporan ekuitas menyajikan informasi tentang ekuitas awal tahun 2019 yang dipengaruhi oleh RK PPKD dan Surplus/defisit-LO tahun berjalan, sehingga menghasilkan ekuitas akhir tahun 2019.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sari (2019) Penelitian ini mengambil judul “Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017. "Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menyajikan pos-pos pendapatan, transfer dan pembiayaan, hanya menyajikan pos belanja karena tidak adanya pendapatan. Pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah hanya menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan sedangkan, pada PP Nomor 71 Tahun 2010 harus menyajikan 7 komponen Laporan Keuangan.

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Pratiwi (2015) "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Magelang Selatan." Penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Magelang Selatan belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan secara penuh, karena hingga saat ini masih mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Staf keuangan Puskesmas Magelang belum mengetahui lebih dalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010, namun mengetahui bahwa standar penyusunan laporan keuangan saat ini adalah berbasis akrual.

Dari penelitian terdahulu, rata-rata hasil penelitian dalam penyajian laporan keuangan belum menerapkan sesuai PSAP secara penuh. Laporan keuangan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, kejelasan dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan infomasi yang jelas juga bagi pihak-pihak tersebut. Dengan adanya perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan dari pencatatan basis kas ke basis akrual maka perlu dianalisis laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi dan penulis menuangkannya dalam penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAP No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan Pemerintah pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti/penulis, Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di dunia kerja.
2. Bagi Instansi Sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai prosedur penyusunan Laporan Keuangan dan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik (Mardiasmo, 2010:186).

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Pada awalnya, standar akuntansi pemerintah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (PP No. 24 Tahun 2005). Ditetapkannya PP SAP, maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 perlu diganti (Penjelasan Umum PP No.71 Tahun 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam Lampiran I.02, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) selaku lembaga legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor (pemeriksa), lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah pusat/daerah. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan versi Lampiran I.02 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Akan tetapi, dalam hal entitas pelaporan

belum dapat menerapkan PSAP tersebut, maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP No. 01 versi Lampiran II.02 (disebut PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual) adalah paling lama empat tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu hingga Tahun Anggaran 2014. Perbedaan yang mendasari PSAP No. 01 versi Lampiran I.02 dengan versi Lampiran II.02 adalah basis akuntansi yang digunakan. Pada PSAP No. 01 versi Lampiran II.02, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sedangkan pada PSAP No. 01 versi Lampiran I.02, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Oleh karena itu, entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Selain itu, pada PSAP No. 01 versi Lampiran I.02 dinyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran di mana hingga saat ini anggaran masih disusun berdasarkan basis kas. Akan tetapi, paragraf standar ini dimaksudkan apabila terjadi perubahan basis anggaran maka penyajian LRA dilakukan berdasarkan basis anggaran yang berlaku.

Lingkup Pengaturan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap

menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Tabel 2.1
Kandungan PP SAP NO. 71 Tahun 2010

PSAP No.	Tentang	SAP Berbasis Akrual	SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
-	Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	Lampiran I.01	Lampiran II.01
PSAP 01	Penyajian Laporan Keuangan	Lampiran I.02	Lampiran II.02
PSAP 02	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	Lampiran I.03	Lampiran II.03
PSAP 03	Laporan Arus Kas	Lampiran I.04	Lampiran II.04
PSAP 04	Catatan atas Laporan Keuangan	Lampiran I.05	Lampiran II.05
PSAP 05	Akuntansi Persediaan	Lampiran I.06	Lampiran II.06
PSAP 06	Akuntansi Investasi	Lampiran I.07	Lampiran II.07
PSAP 07	Akuntansi Aset Tetap	Lampiran I.08	Lampiran II.08
PSAP 08	Akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan	Lampiran I.09	Lampiran II.09
PSAP 09	Akuntansi Kewajiban	Lampiran I.10	Lampiran II.10
PSAP 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan	Lampiran I.11	Lampiran II.11
PSAP 11	Laporan Keuangan Konsolidasian	Lampiran I.12	Lampiran II.12
PSAP 12	Laporan Operasional	Lampiran I.13	-

Sumber : PP SAP No. 71 Tahun 2010

Dalam PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis

yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Arus Kas;
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*) (Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja (Kerangka Konseptual (PP No. 71 Tahun 2010).

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menurut PSAP No. 01 paragraf 9 :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan numerum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya."

Menurut Heri (2016:3) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik (Sujarweni, 2015:88).

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Menurut Tanjung (2015:2), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing OPD yang kemudian akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Mardiasmo (2010:203) mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bagian dari proses pelaporan yang berasal dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh setiap unit pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk proses pengevaluasian kinerja serta pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan budaya.

2.1.3 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam PSAP No. 01 paragraf 9 dijelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Sujarweni (2015:89) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakandan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untukmemberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukanapakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakanbarang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporankeuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and'figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada

berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Menurut *Statement of Financial Accounting No. 4* (SFAC No. 4) (dalam Mardiasmo, 2010:209), tujuan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan.
2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.1.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan (PSAP No. 01 paragraf 3).

Menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee* (IFAC-PSC) (dalam Mardiasmo, 2010:210), pengguna laporan keuangan pemerintah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengawasi.

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3. Investor dan kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah yang pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban dan komitmennya.

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para

pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:90) mengatakan bahwa terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan, antara lain :

1. Wajib pajak
2. Donatur atau pemberi dana
3. Investor
4. Pemakai jasa organisasi sektor publik
5. Karyawan/pegawai
6. Suplier atau pemasok
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih
10. Badan pengawas
11. Lembaga pemerintah
12. Pemberi pinjaman
13. Pemberi sumber daya
14. Badan pengawas keuangan
15. Konstituen

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diembanoleh suatu pelaporan keuangan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.

2.1.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Paragraf Standar No. 14 PSAP N0. 01 versi Lampiran I.02). Dalam PP 71 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa komponen-komponen laporan keuangan tersebut wajib disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan seluruh pemerintah Daerah pada tahun 2015 untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menggunakan basis akrual memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun tujuh komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan. OPD memiliki kewajiban untuk menyusun lima laporan, yaitu yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan. Meskipun sudah berbasis akrual, namun OPD tetap menyusun laporan keuangan berbasis kas yaitu Laporan Realisasi Anggaran, sementara komponen laporan keuangan berbasis akrual yang wajib disusun oleh OPD adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. OPD dalam praktiknya menjalankan dua siklus akuntansi sekaligus agar dapat menghasilkan kelima laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) (Paragraf Standar No. 35 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2008). Maka dari itu, Laporan Realisasi Anggaran disebut sebagai laporan pelaksanaan anggaran karena menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu pelaporan. Persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait diatur lebih lanjut dalam PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 2.2 Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah s/d 6)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx

20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
21		xxx	xxx	xxx	xxx
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 +20 + 25)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxxx	xxxx	xxxx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN(7+26+32)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d42)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx

50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 56)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71					
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga				

	Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam	xxx	xxx	xxx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
97	Pemberian Pinjaman kepada Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
99	PEMBIAYAAN NETO (84 - 98)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
100					

101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
-----	---	------	------	------	------

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Saldo Anggaran Lebih adalah gungan-gungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan (Paragraf Standar No. 8 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldoanggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

Selain itu, entitas pelaporan dalam hal ini Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan konsolidasianya harus menyajikan lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih berdasarkan ilustrasi PSAP 01 E dan 01 F pada halaman selanjutnya;

Tabel 2.3 Format Laporan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	(xxx)	(xxx)
3	Tahun Berjalan		
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

3) Neraca (N)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (Paragraf Standar No. 38 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa laludan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasansejarah dan budaya

- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa laluyang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah. (Paragraf Standar No. 8 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

Tabel 2.4 Format Laporan Neraca

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	xxx	xxx
16	Lainnya		
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		

23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
(28+32)			
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxx	xxx
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx

68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62-67)	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx	xxx

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- Beban dari kegiatan operasional;
- Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- Pos luar biasa, bila ada;
- Surplus/defisit-LO (Paragraf Standar No. 92 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

Manfaat disusun nya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam penyajian laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi : nama entitas, atau identifikasi lainnya, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan (Tanjung, 2014)

Tabel 2.5 Format Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
2	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Hasil Kekayaan	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
7	Jumlah Pendapatan Asli				
8	Daerah (3 s/d 6)				
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH	XXX	XXX	XXX	XXX
11	PUSAT - DANA	XXX	XXX	XXX	XXX
12	PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Hasil Bagi Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
17	Jumlah Pendapatan Transfer				
18	Perimbangan (11 s/d 14) Dana				
19	TRANSFER PEMERINTAH	XXX	XXX	XXX	XXX
	PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer				

20	Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19)					
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	XXX	XXX	XXX	XXX	
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXX	XXX	XXX	XXX	
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25)	XXX	XXX	XXX	XXX	
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX	
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX	
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	XXX	XXX	XXX	XXX	
34						
35	BEBAN					
36	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	
37	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX	
38	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	
39	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX	
40	Beban Pejalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX	
41	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	
42	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	
43	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	
44	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX	
45	Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX	
46	Beban Transfer	XX	XXX	XXX	XXX	
47	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX	
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	XXX	XXX	XXX	XXX	
49						
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	XXX	XXX	XXX	XXX	
*						
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					

53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		xxx	xxx	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban		xxx	xxx	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Non	xxx	xxx	xxx	xxx
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN	DARI NON	xxx	xxx	xxx	xxx
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR	BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
60						
61	POS LUAR BIASA					
62	Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
64	POS LUAR BIASA		xxx	xxx	xxx	xxx
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59+64)		xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah (Paragraf Standar No. 8 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 80-81, Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dantransitoris. Oleh karena itu, Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas

sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas mengatur lebih lanjut mengenai penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas.

Tabel 2.6 Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0

Metode Langsung
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	xxx	xxx
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx

28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
	(19-32)		
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	Xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	Xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
41	Penjualan Aset Tetap	xxx	Xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	Xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
44	Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen	xxx	Xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	xxx	Xxx
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	Xxx
48	Perolehan atas Tanah	xxx	Xxx
49	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
50	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
51	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
52	Perolehan Aset Tetap	xxx	Xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	Xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	Xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	xxx	Xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	xxx	Xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)	xxx	Xxx
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	Xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	xxx	Xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	Xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	xxx	Xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	xxx	Xxx
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx

68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	xxx	xxx
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Kas Keluar (71 s/d 79)	xxx	xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)	xxx	xxx
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	xxx	xxx
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	xxx	xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87)	xxx	xxx
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	xxx
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara	xxx	xxx
92	Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara	xxx	xxx
93	Pengeluaran (90+91) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	xxx	xxx

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan (Paragraf Standar No. 84 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lampiran II, Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas entitas pelaporan. Pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual, istilah Ekuitas dikenal sebagai Ekuitas Dana yang mana terbagi atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Selain itu, pos-pos yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas versi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang tercantum dalam PSAP No. 01 versi Lampiran II.02 berbeda dengan SAP Berbasis Akrual pada PSAP No. 01 versi Lampiran I.02. Oleh karena itu, berdasarkan PSAP No. 01 versi Lampiran I.02, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya;

2. Perubahan nilai aset karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Suatu entitas pelaporan juga harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi PSAP 01.C dan 01.D.

Tabel 2.7 Format Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0**

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF	PERUBAHAN	xxx
4	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		xxx
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
6	SELISIH REVALUASI	xxx	xxx
7	ASET TETAP LAIN-LAIN	xxx	xxx
	EKUITAS AKHIR		

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Paragraf Standar No. 105 PSAP No. 01 versi Lampiran I. 02).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau daftar rincian atau analisis dari angka/nilai suatu pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendaladan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.

2.1.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas (PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif.

Berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika informasi yang termuat didalamnya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b) Andal

Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.

Karakteristik informasi yang andal antara lain sebagai berikut:

1. Penyajian Jujur, yaitu jika informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), yaitu jika informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas laporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan keuangan pemerintah yang tidak memenuhi karakteristik kualitas akan berdampak buruk bagi pemerintah. Pemberian informasi yang tidak dapat diandalkan akan mengurangi kegunaan dari laporan keuangan yang telah disajikan. Menurut Mardiasmo (2010:174), laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain :

- a. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah).
- b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi.
- c. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
- d. Kualitas keputusan menjadi buruk.
- e. Laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang terkandung dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami karena nantinya akan digunakan oleh para pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menganalisis data mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.

2.1.7 Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

Dalam Mardiasmo (2010:216), perbedaan dua sektor tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Disamping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, kedua sektot ini juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan. Siklus akuntansi pada kedua sektor ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Tabel 2.8
Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

Perbedaan	
Laporan Keuangan Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus Finansial dan Politik	Fokus Finansial
Kinerja diukur secara finansial dan nonfinansial	Sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas	Pertanggungjawaban kepada pemegang sahan dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat ke masa depan secara detail	Tidak dapat melihat ke masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi
Persamaan	
a. Dokumen-dokumen sumber	
b. Berperan sebagai hubungan masyarakat (<i>public relations</i>)	

Sumber : A. Likierman and A. Taylor, Governtment's New Departmental Reports, CACA (1990) dalam Henley, D. Et al (1992), disesuaikan

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini antara lain :

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nicky Dwi Widjayanti (2010)	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Yang Diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007	Penyajian laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008 belum menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan.
2.	Umi Riyanti (2011)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelelawan	Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelelawan ternyata belum memahami terhadap pelaporan Keuangan Pemerintah yang memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3.	Dalma Ayu Lestari dan Desi Efrianti (2012)	Analisis Penyusuna Dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan	Hasil penelitian yang penulis lakukan di Pemerintah Kabupaten Bogor tentang laporan keuangan daerah sudah mengacu kepada PSAP No. 01, adapun usaha Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan sudah menunjukanakan tertibnya administrative baik dalam teknik dan pelaksannya sebagai titik awal pembuatan laporan keuangan.

4.	Fitri Rahmadani (2015)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) NO. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subussalam	menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam telah melakukan proses Penyusunan Laporan Keuangan akuntansinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, untuk proses pencatatannya telah sesuai juga, walaupun ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada Laporan Realisasi Anggaran
5.	Maharani Pratiwi (2015)	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Magelang Selatan	Puskesmas Magelang Selatan belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010.
6.	R.V Pajouw (2015)	Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Laporan keuangan yang dihasilkan UPTD Metrologi adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Karena penyajian LRA dari UPTD yang bersangkutan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sebagaimana mestinya.
7.	Yulia Trisaptya (2016)	Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pelaporan informasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan informasi LKPD
8.	Juliana Mantiri, Dkk (2016)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah	Penyajian laporan keuangan Disperindag telah sesuai berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan

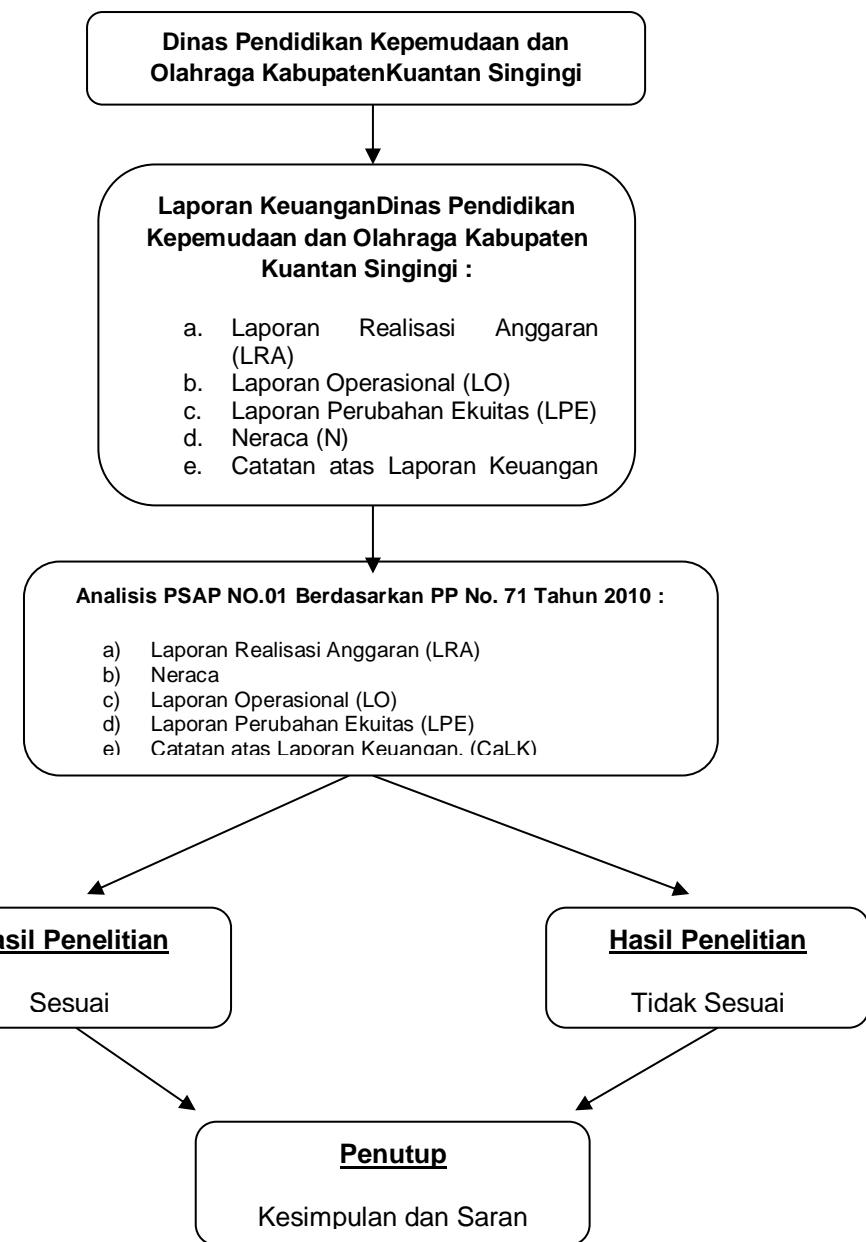
		Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulawesi Utara	merupakan pertama kali menyajikan laporan keuangan berdasarkan PP No.71 tahun 2010.
9.	Fitriani (2017)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai secara umum sudah sesuai dengan PSAP 01, untuk Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai secara umum sudah sesuai dengan PSAP 01 kecuali paragraf 84 yang belum sesuai untuk komponen ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAP
10.	Fika Nelvi Sari (2019)	Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017.”	Penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menyajikan pos-pos pendapatan, transfer dan pembiayaan, hanya menyajikan pos belanja karena tidak adanya pendapatan. Pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah hanya menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan sedangkan, pada PP Nomor 71 Tahun 2010 harus menyajikan 7 komponen Laporan Keuangan.

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 :

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran**



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif komparatif yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat penelitian yang sedang dilakukan.

Metode deskriptif merupakan metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2015:8). Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Metode komparatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan organisasi dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut (Sugiyono, 2015:8)

Dalam penelitian ini penulis membandingkan laporan keuangan pemerintah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan keuangan (CALK) dengan PSAP No. 01 apakah telah sesuai.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Jl. Rusdi S. Abrus Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni s/d Agustus 2020.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

Pelaksanaan Kegiatan							
Penelitian	Nov	Des	Jan	Feb-Mei	Juni	Jul-Agt	Sept
ACC Judul							
Pencarian Data Awal							
Penyusunan Proposal							
Bimbingan							
Seminar Proposal							
Revisi Proposal							
Penelitian dan Bimbingan							
Ujian Skripsi							

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Supomo dan Indriantoro, 2011 : 115).

Penentuan subjek penelitian dilakukan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan yang benar-benar menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Populasi penelitian ini

adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi atau meneliti sebagian elemen-elemen populasi (Supomo dan Indriantoro, 2011: 131). Sampel dari penelitian ini adalah laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Soepomo dan indriantoro, 2011:146). Data primer dalam penelitian berupa wawancara untuk data awal penelitian.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah dalam arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Soepomo dan Indriantoro, 2011:147). Data sekunder

dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2015:163). Dokumen dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi).

- 2. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2015:162). Observasi dalam penelitian ini berupa peninjauan awal dengan melakukan observasi dan menganalisa dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2019.

- 3. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan

(Sugiyono, 2015:162). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada *key informan* yang berhubungan langsung dengan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Key Informan yang dipilih peneliti diharapkan bisa memberikan informasi yang dapat membantu peneliti untuk mengetahui penerapan PSAP No. 01 dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti memutuskan key informan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bapak R. Sahdan, SE selaku Kasubbag Keuangan
- b. Ibu Ira Maya Sandi selaku staf keuangan

3.6 Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif.

1. Metode deskriptif merupakan metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2015:8).
2. Metode komparatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan

Operasional (LO),

3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan keuangan (CALK) dengan PSAP No. 01 kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut (Sugiyono, 2015:8).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah :

- 1) Memperoleh data.
- 2) Setelah data diperoleh, maka peneliti mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Menginterpretasikan atau memaparkan data yang berupa laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- 4) Menganalisis dan membandingkan laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- 5) Menarik kesimpulan apakah laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 01.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang, 15 (lima belas) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 15 (lima belas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelayanan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka mewujudkan Pendidikan dan Pelayanan pengembangan kepemudaan dan olahraga dalam rangka mewujudkan Pendidikan Untuk Semua

(PUS) yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
2. Perencanaan dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
3. Pelaksanaan fasilitasi dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
4. Pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
5. Pembinaan dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
6. Pengawasan dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
7. Pengendalian dan monitoring dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
8. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

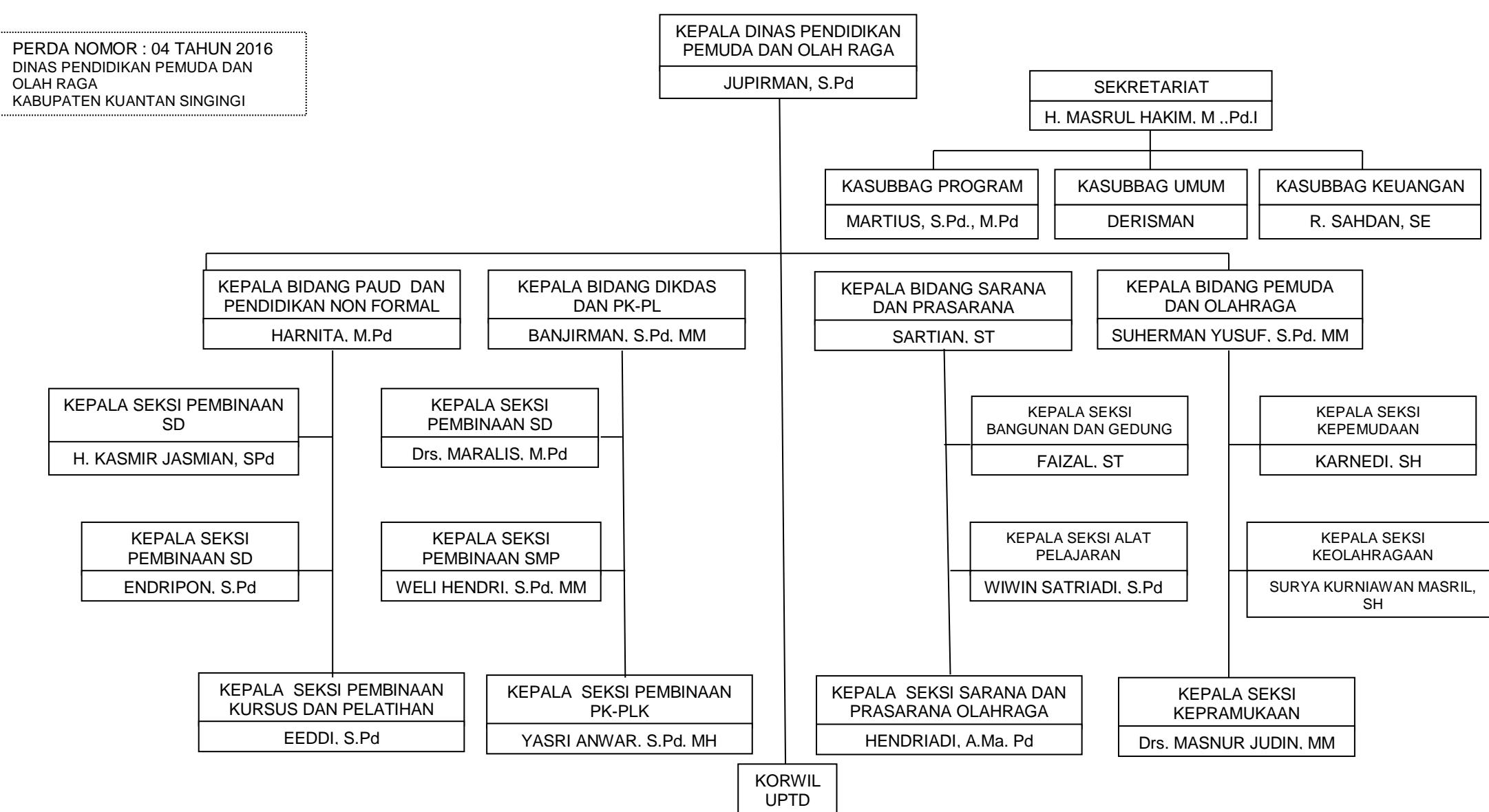
Visi :

“Terwujudnya penyelenggara pendidikan kepemudaan dan olahraga yang bermutu maju dan merata bedasarkan iman dan taqwa”

Misi :

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan yang meluas merata dan berkeadilan
2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu
3. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik
5. Meningkatkan eksistensi peran muda yang kreatif, produktif, berprestasi dan berkarakter dalam bidang olahraga dan seni
6. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilakukan di tingkat OPD sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

Laporan keuangan yang dibuat OPD, sebagai entitas akuntansi, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disusun berdasarkan anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh OPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Laporan Keuangan Unaudited Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2019:33).

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rahmadani (2018) yang memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun tujuh komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2019) yang menyatakan bahwa pada OPD cukup menyajikan lima komponen laporan keuangan saja yaitu Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

4.2.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada PSAP No. 01 dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktik-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah dan dicatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
 - 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja untuk melaksanakan aktifitas), yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud.
 - 3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan dicatat dalam pos surplus/defisit
 - 4) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima dan dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

b. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
- e) Lain-lain
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir

c. Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Neraca (N)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenaiaset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yangdikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Operasional (LO)

- 1) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b) Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- 2) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO diakui pada saat :
 - a) Timbulnya kewajiban

b) Terjadinya konsumsi aset

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Kewajiban timbul saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.

- 3) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.
- 4) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perli dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit luar biasa.
- 5) Surplus/defisit- LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan keuangan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

- 6) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit yang memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah terjadi luar biasa harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)
- 1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain : belanja pegawai, belanja barang, bunga ,subsidi, dan hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Dan apabila entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang diperuntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau

untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

- 2) Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari perolehan aset tetap, dan perolehan aset lainnya.
- 3) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain : Penerimaan pinjaman, penerimaan surat, utang/obligasi Pemda, hasil privatisasi perusahaan daerah/divestasi, penjualan investasi jangka panjang lainnya; dan pencairan dana cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain pembayaran cicilan pokok utang, pembayaran pokok surat utang/obligasi Pemda, penyertaan modal

pemerintah, pemberian pinjaman jangka panjang; dan pembentukan dana cadangan.

- 4) Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), seperti potongan/penyetoran iuran Taspen, Askes, PPh, dan PPN. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK, seperti uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan potongan PPh dan PPN yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK, seperti penyetoran uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang disetor langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan penyetoran dan penyetoran potongan PPh dan PPN.

- f. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas antara kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengecualian transaksi bukan kas dari laporan arus kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
 - 4) Ekuitas akhir
- g. Kebijakan Akuntansi atas Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
- Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
 2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan atau ekonomi makro.
 3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi atau kejadian penting lainnya.
 5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
 6. Mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam laporan keuangan menyediakan

informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (Laporan Keuangan Unaudited Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2019:34)

h. Implementasi Akuntansi berbasis akrual pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* diklarifikasikan menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Dari penelitian yang telah dilakukan, penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dari tahun 2015, dan menyajikan 5 (lima) komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca (N), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kemudian apabila

menurut PSAP No. 01 Terdiri dari 7 (tujuh) komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Namun dalam PSAP No. 01 juga menjelaskan bahwa komponen-komponen laporan keuangan tersebut wajib disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali : (a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasianya. Bila dibandingkan dengan dengan penyajian laporan keuangan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi maka sudah sesuai dengan PSAP No. 01.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Peneliti simpulkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penyajian Laporan Keuangan
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

No	Elemen – elemen	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
1	Komponen Laporan keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas laporan keuangan
2	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus/defisit-LRA
3	Neraca	Neraca mencakup pos-pos sebagai berikut : 1. Aset Lancar 2. Aset tetap

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Aset lainnya 4. Kewajiban jangka pendek 5. Ekuitas
4	Laporan Operasional	<p>Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan-LO 2. Beban 3. Surplus/defisit dari operasi
5	Laporan Perubahan Ekuitas	<p>Pos-pos laporan perubahan ekuitas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas awal 2. RK-PPKD 3. Surplus defisit-LO 4. Ekuitas akhir
6	Catatan Atas Laporan Keuangan	Mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
7	Laporan Arus Kas	Tidak membuat laporan arus kas karena hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perpendaharaan umum;
8	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih karena hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
7	Pengukuran	Asset, kewajiban, penghasilan dan beban di ukur dengan biaya historis dan nilai wajar.
8	Pengakuan	Pengakuan pos-pos laporan keuangan menggunakan dasar akrual.
9	Penyajian	Menggunakan penyajian wajar

Sumber : Data olahan dan PSAP No. 01

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketataan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) (Paragraf Standar No. 35 PSAP 01 versi Lampiran I.02).Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan PSAP No.01. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggambarkan perbandingan antara dokumen perubahan pelaksanaan anggaran tahun 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d Desember 2019.

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SKPD: 1.01.01.01.-DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2019

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	22.500.000,00	45,00	0
Pendapatan Asli Daerah	50.000.000,00	22.500.000,00	45,00	0
Hasil Pajak Daerah	-			0
Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	22.500.000,00	45,00	0
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	50.000.000,00	22.500.000,00	45,00	0
PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	0
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	0
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	0
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	-	-	-	0

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	-	-	-	0
Transfer Dari Pemerintah Pusat lainnya	-	-	-	0
a. Dana otonomi Khusus	-	-	-	0
b. Dana Penyesuaian	-	-	-	0
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	0
Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	0
Pendapatan Hibah	-	-	-	0
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0
Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	0
JUMLAH PENDAPATAN	50.000.000,00	22.500.000,00	45,00	-
BELANJA DAERAH	548.252.137.093,74	471.453.484.732,00	85,99	0
Belanja Operasi	441.806.567.593,74	393.461.357.290	89,06	0
1. Belanja Pegawai	383.811.780.593,74	371.714.871.600,00	96,85	0
2. Belanja Barang dan Jasa	57.994.787.000,00	21.746.485.690,00	37,50	0
3. Belanja Bunga	-	-	-	0
4. Belanja Subsidi	-	-	-	0
5. Belanja Hibah	-	-	-	0
6. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5
7. Belanja Bantuan Keuangan	-	-		0
Jumlah Belanja Operasi	441.806.567.593,74	393.461.357.290,00	89,06	0
BELANJA MODAL	106.445.569.500,00	77.992.127.442,00	73,27	0
Tanah	-	-	-	0
Peralatan dan Mesin	41.086.825.500,00	26.693.195.150,00	64,97	0
Gedung dan Bangunan	47.921.082.500,00	42.984.314.547,00	89,70	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0
Aset Tetap Lainnya	17.437.661.500,00	8.314.617.745,00	47,68	0
Jumlah Belanja Modal	106.445.569.500,00	77.992.127.442,00	73,27	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	0
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	0
Jumlah Belanja Tidak Terduga	-	-	-	0
JUMLAH BELANJA	548.252.137.093,74	471.453.484.732,00	85,99	-
TRANSFER	-	-	-	0
Transfer Bagi Hasil Ke Desa	-	-	-	0
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
Jumlah Transfer	-	-	-	0
SURPLUS/(DEFISIT)	(548.252.137.093,74)	(471.453.484.732,00)	86,00	0

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5
Jumlah Penerimaan Pembayaran	-	-	-	0
Jumlah Pengeluaran Pembayaran	-	-	-	0

Sumber : Laporan Keuangan Disdikpora 2019

2. Neraca (N)

Neraca merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang menyajikan pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas secara komparatif. (Tanjung, 2014:84)

Neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Pos-pos yang disajikan dalam neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, dan ekuitas. Dari penjelasan diatas maka neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 01. Penyajian Neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada halaman selanjutnya:

Tabel 4.3

Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
1.01.01.01.-DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
ASET	558.189.509.280,91	478.134.424.045,91
ASET LANCAR	260.528.535,00	260.528.535,00
Kas dan Setara Kas	260.528.535,00	260.528.535,00
Kas Lainnya	260.528.535,00	260.528.535,00
Kas Lainnya dana BOS	260.528.535,00	260.528.535,00
ASET TETAP	539.237.986.472,30	459.182.901.237,30
Tanah	133.310.768.881,02	133.310.768.881,02
Tanah Untuk Bangunan Gedung	133.310.768.881,02	133.310.768.881,02
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	5.489.041.260,00	5.489.041.260,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	124.761.294.681,02	124.761.294.681,02
Tanah Bangunan Pengairan	3.060.432.640,00	3.060.432.640,00
Peralatan dan Mesin	173.184.409.262,81	146.444.090.112,81
Alat Angkutan Darat Bermotor	387.000.000,00	387.000.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	120.000.000,00	120.000.000,00
Kendaraan Bermotor Roda Dua	267.000.000,00	267.000.000,00
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2.350.000,00	2.350.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.350.000,00	2.350.000,00
Alat Bengkel Bermesin	26.440.000,00	26.440.000,00
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	1.750.000,00	1.750.000,00
Perkakas Bengkel Listrik	24.690.000,00	24.690.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	3.575.000,00	3.575.000,00
Perkekas Standar (Standart Tool)	3.575.000,00	3.575.000,00
Alat Ukur	106.123.274,00	106.123.274,00
Alat Ukur Universal	105.173.274,00	105.173.274,00
Alat Timbangan?Blora	950.000,00	950.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	12.150.000,00	12.150.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman	12.150.000,00	12.150.000,00
Alat Kantor	6.066.374.994,55	6.066.374.994,55
Mesin Tik	670.054.500,04	670.054.500,04
Mesin Hitung/Jumlah	10.520.000,00	10.520.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Alat Produksi (Pengganda)	451.800.000,00	451.800.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.762.009.493,57	1.762.009.493,57
Alat Kantor Lainnya	3.171.991.000,94	3.171.991.000,94
Alat Rumah Tangga	66.888.876.164,55	66.888.876.164,55
Meubelair	57.444.887.369,82	53.929.743.369,82
Alat Pengukur Waktu	6.570.000,00	6.570.000,00
Alat Pembersih	96.887.500,00	96.887.500,00
Alat Pendingin	365.592.566,38	365.592.566,38
Alat Dapur	26.147.000,00	26.147.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.948.791.728,35	8.948.791.728,35
Komputer	22.287.595.840,56	16.526.421.690,56
Personal Komputer	12.112.789.894,05	12.112.789.894,05
Peralatan Komputer Mainframe	2.421.957.000,00	2.421.957.000,00
Peralatan Mini Komputer	6.160.155.451,51	1.275.436.501,51
Peralatan Personal Komputer	1.514.729.495,00	680.410.295,00
Peralatan Jaringan	35.828.000	35.828.000
Laptop/Notebook	42.500.000,00	0,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat	853.076.474,60	853.076.474,60
Meja Kerja	5.010.000,00	5.010.000,00
Meja Rapat	15.401.595,48	15.401.595,48
Kursi Kerja	5.850.000,00	5.850.000,00
Kursi Rapat	7.400.000,00	7.400.000,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja	10.630.144,44	10.630.144,44
Lemari dan Arsip	808.784.370,68	808.784.370,68
Alat Studio	2.802.467.249,29	2.802.467.249,29
Peralatan Studio Visual	2.798.967.249,29	2.798.967.249,29
Peralatan Studio Video dan Film A	3.500.000,00	3.500.000,00
Alat Komunikasi	163.602.108,13	163.602.108,13
Alat Komunikasi Telephone	162.582.108,13	162.582.108,13
Alat Komunikasi Sosial	1.020.000,00	1.020.000,00
Alat Kedokteran	1.645.000,00	1.645.000,00
Alat Kedokteran Umum	1.645.000,00	1.645.000,00
Unit-unit Laboratorium	37.143.965.151,02	37.143.965.151,02

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Alat Laboratorium Microbiologi	1.440.000,00	1.440.000,00
Alat Laboratorium Model/Hidrolika	61.639.559,47	61.639.559,47
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	6.285.876,88	6.285.876,88
Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	1.111.842.756,72	1.111.842.756,72
Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan	147.795.554,62	147.795.554,62
Alat Laboratorium Cocok Tanam	145.206.078,74	145.206.078,74
Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	764.223.327,66	764.223.327,66
Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	606.852.372,70	606.852.372,70
Alat Laboratorium Umum	29.829.527.561,12	29.829.527.561,12
Alat Laboratorium Umum A	220.422.222,20	220.422.222,20
Alat Laboratorium Fisika	663.683.071,14	663.683.071,14
Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	36.134.595,30	36.134.595,30
Alat Laboratorium Pertanian	15.614.658,40	15.614.658,40
Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	768.412.064,08	768.412.064,08
Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	180.302.928,30	180.302.928,30
Alat Laboratorium Biologi	242.171.308,50	242.171.308,50
Alat Laboratorium Geofisika	275.426.704,90	275.426.704,90
Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	2.066.984.510,29	2.066.984.510,29
Alat Peraga/Praktek Sekolah	35.041.187.629,45	17.659.700.629,45
Bidang Studi: Bahasa Indonesia	2.629.587.037,95	2.629.587.037,95
Bidang Studi: Matematika	4.099.524.263,09	4.099.524.263,09
Bidang Studi: IPA Dasar	278.563.947,21	278.563.947,21
Bidang Studi: IPA Lanjutan	2.511.566.550,00	2.511.566.550,00
Bidang Studi: IPA Menengah	922.925.775,75	922.925.775,75
Bidang Studi: IPA Atas	616.948.887,84	616.948.887,84
Bidang Studi: IPS	1.986.674.577,78	1.986.674.577,78
Bidang Studi: Agama Islam	181.628.481,50	181.628.481,50
Bidang Studi: Keterampilan	2.639.158.101,09	2.639.158.101,09

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Bidang Studi: Kesenian	146.522.763,48	146.522.763,48
Bidang Studi: Olahraga	1.020.290.582,66	1.020.290.582,66
Bidang Studi: PMP	636.309.661,10	636.309.661,10
Alat Peraga/Praktek Sekolah	17.381.487.000,00	0,00
Bidang Pendidikan/Keterampilan		
Lain-lain		
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	186.224.487,43	186.224.487,43
Instrumen Probe/Sensor	186.224.487,43	186.224.487,43
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	66.384.003,38	66.384.003,38
Radiation Detector	54.422.338,88	54.422.338,88
Opto Electronics	11.961.664,50	11.961.664,50
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.065.920,23	1.065.920,23
Meteorological Equipment	1.065.920,23	1.065.920,23
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	118.774.277,68	118.774.277,68
Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	109.609.081,03	109.609.081,03
Alat Laboratorium Penunjang	9.165.196,65	9.165.196,65
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.015.092.444,25	1.015.092.444,25
MOB	1.015.092.444,25	1.015.092.444,25
Persenjataan Non Senjata Api	10.075.243,69	10.075.243,69
Alat Keamanan	10.075.243,69	10.075.243,69
Gedung dan Bangunan	406.014.766.483,30	406.014.766.483,30
Bangunan Gedung Tempat Kerja	406.014.766.483,50	406.014.766.483,50
Bangunan Gedung Kantor	4.478.851.317,00	4.478.851.317,00
Bangunan Gudang	130.334.400,00	130.334.400,00
Bangunan Gedung Laboratorium	5.916.050.677,10	5.916.050.677,10
Bangunan Kesehatan	100.013.550,00	100.013.550,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.676.083.012,83	1.676.083.012,83
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	379.937.956.949,80	379.937.956.949,80
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.973.918.022,47	1.973.918.022,47
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	27.153.000,00	27.153.000,00
Bangunan Gedung Perpustakaan	10.291.757.371,30	10.291.757.371,30
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.482.648.182,80	1.482.648.182,80

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Rumah Negara Golongan II	1.482.648.182,80	1.482.648.182,80
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.290.484.987,73	2.290.484.987,73
Bangunan Air Bersih/Baku	2.099.235.000,00	2.099.235.000,00
Bangunanpelengkap Air Bersih / Baku	2.099.235.000,00	2.099.235.000,00
Instalasi Air Minum Bersih	1.554.000,00	1.554.000,00
Air Tanah Dangkal	1.554.000,00	1.554.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	350.000,00	350.000,00
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	350.000,00	350.000,00
Instalasi Gardu Listrik	140.052.000,00	140.052.000,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	140.052.000,00	140.052.000,00
Jaringan Listrik	49.293.987,73	49.293.987,73
Jaringan Distribusi	49.293.987,73	49.293.987,73
Aset Tetap Lainnya	20.613.049.670,79	20.613.049.670,79
Buku	18.299.291.946,10	18.299.291.946,10
Umum	5.767.471.512,10	5.767.471.512,10
Ilmu Sosial	5.831.031.080,00	5.831.031.080,00
Ilmu Bahasa	47.647.000,00	47.647.000,00
Matematika & Pengetahuan Alam	57.934.000,00	57.934.000,00
Ilmu Pengetahuan Praktis	19.490.000,00	19.490.000,00
Geografi, Biologi, Sejarah	156.000,00	156.000,00
Buku Pustaka	6.575.567.354,00	6.575.567.354,00
Barang-Barang perpustakaan	1.739.050.391,00	1.739.050.391,00
Peta	1.739.050.391,00	1.739.050.391,00
Barang Bercorak Kebudayaan	558.184.333,69	558.184.333,69
Alat Kesenian	460.429.758,79	460.429.758,79
Alat Olahraga	97.754.574,90	97.754.574,90
Tanaman	16.523.000,00	16.523.000,00
Tanaman Haltikultura	16.523.000,00	16.523.000,00
Konstruksi Dalam penggerjaan	18.773.043,81	18.773.043,81
Konstruksi Dalam penggerjaan	18.773.043,81	18.773.043,81
Konstruksi Dalam penggerjaan.....	18.773.043,81	18.773.043,81
Akumulasi Penyusutan	(194.194.265.857,16)	(194.194.265.857,16)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88.679.802.172,40)	(88.679.802.172,40)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(389.014.285,72)	(389.014.285,72)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Mesin	(30.015.000,00)	(30.015.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(106.123.274,00)	(106.123.274,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	(10.550.000,00)	(10.550.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.308.544.028,66)	(5.308.544.028,66)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(62.520.883.868,38)	(62.520.883.868,38)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	466.344.920,39	466.344.920,39
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(2.014.504.844,21)	(2.014.504.844,21)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	31.727.330,00	31.727.330,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(1.645.000,00)	(1.645.000,00)
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(18.786.518.878,10)	(18.786.518.878,10)
Akumulasi Penyusutan Senjata Api	(10.075.183,71)	(10.075.183,71)
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(60,01)	(60,01)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(107.052.214.736,30)	(107.052.214.736,30)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(107.052.214.736,30)	(107.052.214.736,30)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(462.248.948,46)	(462.248.948,46)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	(442.065.700,00)	(442.065.700,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	(14.021.500,00)	(14.021.500,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minuman	(1.232.350,69)	(1.232.350,69)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(4.929.397,77)	(4.929.397,77)
Aset Lainnya	18.690.994.273,61	18.690.994.273,61
Aset Tidak Berwujud	3.654.645.547,28	3.654.645.547,28
Goodwill	10.320.320.735,78	10.320.320.735,78
Goodwill.....	10.320.320.735,78	10.320.320.735,78
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.665.675.188,50)	(6.665.675.188,50)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(6.665.675.188,50)	(6.665.675.188,50)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Aset Lainnya	15.036.348.726,33	15.036.348.726,33
Aset Lainnya	22.437.851.019,73	22.437.851.019,73
Aset Lainnya.....	22.437.851.019,73	22.437.851.019,73
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	(7.401.502.293,40)	(7.401.502.293,40)
Akumulasi Penyusutan Aset Laiin Laiin	(7.401.502.293,40)	(7.401.502.293,40)
Jumlah Aset	558.189.509.280,91	478.134.424.045,91
Kewajiban	2.165.271.493,00	102.313.700,00
Kewajiban Jangka Pendek	2.165.271.493,00	102.313.700,00
Utang Belanja	2.165.271.493,00	102.313.700,00
Utang Belanja Pegawai	102.313.700,00	102.313.700,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	102.313.700,00	102.313.700,00
Utang Belanja Modal	2.062.957.793,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	47.124.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	2.015.833.793,00	0,00
Jumlah Kewajiban	2.165.271.493,00	102.313.700,00
Ekuitas	556.024.237.787,91	478.032.110.345,91
Ekuitas	556.024.237.787,91	478.032.110.345,91
Ekuitas	84.593.253.055,91	478.032.110.345,91
Ekuitas	478.032.110.345,91	478.032.110.345,91
Ekuitas	478.032.110.345,91	478.032.110.345,91
SURPLUS/DEFISIT-LO	(393.438.857.290,00)	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(393.438.857.290,00)	0,00
RKPPKD	471.340.984.732,00	0,00
RK PPKD	471.340.984.732,00	0,00
RK PPKD	471.340.984.732,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DAN	556.024.237.787,91	478.032.110.345,91
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	558.189.509.280,91	478.134.424.045,91

Sumber : Laporan Keuangan Disdikpora 2019

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos yaitu Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, serta surplus/defisit- LO. (Tanjung, 2014:87)

Penyajian Laporan Operasional Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah merujuk pada PSAP No.01 yaitu menggambarkan ikhtisar data pendapatan operasional dan beban operasional selama periode 1 Januari s.d Desember 2019. Pos-pos yang terdapat pada laporan operasional Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa ; Pendapatan-LO, beban, dan surplus defisit-LO.

Berikut penyajian Laporan Operasional Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 4.4
Laporan Operasional
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>PENDAPATAN - LO</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - Lo	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Olahraga – LO				
Pelayanan Tempat – LO	22.500.000,00	0.00	22.500.000,00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	22.500.000,00	0.00	22.500.000,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	22.500.000,00	0.00	22.500.000,00	100.00
OPERASI – LO				
Tunjangan Pegawai – LO	371.350.825.600,00	0.00	371.350.825.600,00	100.00
Beban Tunjangan Gaji dan Tunjangan – LO	206.474.911.642,00	0.00	206.474.911.642,00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	161.698.018.491,00	0.00	161.698.018.491,00	100.00
Tunjangan Kelurga – LO	15.197.380.111,00	0.00	15.197.380.111,00	100.00
Tunjangan Jabatan – LO	213.730.000,00	0.00	213.730.000,00	100.00
Tunjangan Fungsional – LO	14.526.271.000,00	0.00	14.526.271.000,00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum – LO	364.155.000,00	0.00	364.155.000,00	100.00
Tunjangan Beras – LO	7.425.512.280,00	0.00	7.425.512.280,00	100.00
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus – LO	889.998.871,00	0.00	889.998.871,00	100.00
Pembulatan Gaji – LO	2.330.482,00	0.00	2.330.482,00	100.00
Beban Jaminan Kesehatan – LO	4.541.932.427,00	0.00	4.541.932.427,00	100.00
Tunjangan Daerah Terpencil – LO	287.975.000,00	0.00	287.975.000,00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja – LO	331.902.280,00	0.00	331.902.280,00	100.00
Iuran Jaminan Kematian – LO	995.705.700,00	0.00	995.705.700,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	164.875.913.958,00	0.00	164.875.913.958,00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja – LO	39.901.484.138,00	0.00	39.901.484.138,00	100.00
Tunjangan Profesi Guru	94.034.491.620,00	0.00	94.034.491.620,00	100.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
(Sertifikasi) – LO				
Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi) – LO	835.000.000,00	0.00	835.000.000,00	100.00
Tunjangan Khusus Guru – LO	30.104.938.200,00	0.00	30.104.938.200,00	100.00
Tunjangan Barang dan Jasa	22.110.531.690,00	0.00	22.110.531.690,00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	981.452.500,00	0.00	981.452.500,00	100.00
Beban Persediaan Alat Alat Tulis Kantor	412.940.000,00	0.00	412.940.000,00	100.00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	121.762.500,00	0.00	121.762.500,00	100.00
Beban Persediaan Perangko Materai dan Benda pos lainnya	94.993.000,00	0.00	94.993.000,00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	156.970.000,00	0.00	156.970.000,00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	64.310.000,00	0.00	64.310.000,00	100.00
Belanja Publikasi dan Dokumentasi	5.350.000,00	0.00	5.350.000,00	100.00
Beban Buku administrasi Sekolah –LO	3.000.000,00	0.00	3.000.000,00	100.00
Beban Peralatan Olahraga	109.027.000,00	0.00	109.027.000,00	100.00
Beban Peralatan dan Perlengkapan Pelatihan	5.000.000,00	0.00	5.000.000,00	100.00
Beban Barang/Jasa Bahan Bacaan dan Buku-Buku Lainnya –LO	8.100.000,00	0.00	8.100.000,00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	40.588.000,00	0.00	40.588.000,00	100.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	7.548.000,00	0.00	7.548.000,00	100.00
Beban Persediaan Bahan Percontohan	27.290.000,00	0.00	27.290.000,00	100.00
Beban Persediaan Bahan Material Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.750.000,00	0.00	5.750.000,00	100.00
Perlengkapan Jasa Kantor	15.924.942.450,00	0.00	15.924.942.450,00	100.00
Perlengkapan Jasa telepon	56.000.000,00	0.00	56.000.000,00	100.00
Beban Jasa Air	500.000,00	0.00	500.000,00	100.00
Beban Jasa Listrik	144.593.454,00	0.00	144.593.454,00	100.00
Beban Jasa surat kabar/ Majalah	84.845.000,00	0.00	84.845.000,00	100.00
Beban Jasa kawat / Faksimili / Internet	6.000.000,00	0.00	6.000.000,00	100.00
Beban Dokumentasi / Dekorasi/Spanduk	20.904.000,00	0.00	20.904.000,00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan / Pelaksanaan Pendidikan	15.429.700.000,00	0.00	15.429.700.000,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	134.400.000,00	0.00	134.400.000,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	0.00	48.000.000,00	100.00
Beban Premi Asuransi	2.000.000,00	0.00	2.000.000,00	100.00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	2.000.000,00	0.00	2.000.000,00	100.00
Beban Perawatan Kendraan Bermotor	39.358.172,00	0.00	39.358.172,00	100.00
Beban Jasa Service	18.509.552,00	0.00	18.509.552,00	100.00
Beban Pengganti Suku Cadang	3.800.000,00	0.00	3.800.000,00	100.00
Beban Pengadaan Ban Luar/Dalam	17.048.620,00	0.00	17.048.620,00	100.00
Beban Cetak dan Pengandaan	1.006.845.875,00	0.00	1.006.845.875,00	100.00
Beban Cetak	680.300.125,00	0.00	680.300.125,00	100.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pengandaan	326.545.750,00	0.00	326.545.750,00	100.00
Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	19.600.000,00	0.00	19.600.000,00	100.00
Beban Sewa Gedung / Kantor / Tempat	19.600.000,00	0.00	19.600.000,00	100.00
Beban sewa perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	0.00	4.200.000,00	100.00
Beban Sewa Pakaian Adat / Tradisional	2.400.000,00	0.00	2.400.000,00	100.00
Beban Sewa Sound System	1.800.000,00	0.00	1.800.000,00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	514.499.175,00	0.00	514.499.175,00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	282.974.175,00	0.00	282.974.175,00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	225.275.000,00	0.00	225.275.000,00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Harian Siswa-LO	6.250.000,00	0.00	6.250.000,00	100.00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	46.800.000,00	0.00	46.800.000,00	100.00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.800.000,00	0.00	46.800.000,00	100.00
Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	0.00	6.000.000,00	100.00
Beban Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	0.00	6.000.000,00	100.00
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	173.100.000,00	0.00	173.100.000,00	100.00
Beban Pakaian Olahraga	52.800.000,00	0.00	52.800.000,00	100.00
Beban Pakaian Peserta	42.300.000,00	0.00	42.300.000,00	100.00
Beban Pakaian Seragam Tertentu	78.000.000,00	0.00	78.000.000,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	1.581.156.914,00	0.00	1.581.156.914,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	921.420.000,00	0.00	921.420.000,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	659.736.914,00	0.00	659.736.914,00	100.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan	238.160.800,00	0.00	238.160.800,00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.947.500,00	0.00	84.947.500,00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	153.213.300,00	0.00	153.213.300,00	100.00
Beban Barang Untuk Diberikan Kepada Syarat / Pihak Ketiga	15.000.000,00	0.00	15.000.000,00	100.00
Beban Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	0.00	15.000.000,00	100.00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan PNS	425.396.800,00	0.00	425.396.800,00	100.00
Beban Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan	134.700.000,00	0.00	134.700.000,00	100.00
Beban Bimbingan Teknis	149.999.800,00	0.00	149.999.800,00	100.00
Beban Pengembangan Sumber Daya Manusia	140.697.000,00	0.00	140.697.000,00	100.00
Honorarium PNS	26.250.000,00	0.00	26.250.000,00	100.00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.250.000,00	0.00	26.250.000,00	100.00
Honorarium Non PNS	411.196.000,00	0.00	411.196.000,00	100.00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	47.150.000,00	0.00	47.150.000,00	100.00
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	42.000.000,00	0.00	42.000.000,00	100.00
Honorarium Pembantu Pelaksana Kegiatan	100.546.000,00	0.00	100.546.000,00	100.00
Honorarium Non PNS Lain-Lain	45.500.000,00	0.00	45.500.000,00	100.00
Honorarium Operator/ Cleaning Service/ Penjaga Malam	176.000.000,00	0.00	176.000.000,00	100.00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	4.500.000,00	0.00	4.500.000,00	100.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4.500.000,00	0.00	4.500.000,00	100.00
Beban Jasa Transportasi Dan Akomodasi	649.485.000,00	0.00	649.485.000,00	100.00
Beban Jasa Transportasi	435.635.000,00	0.00	435.635.000,00	100.00
Beban Jasa Akomodasi	213.850.000,00	0.00	213.850.000,00	100.00
JUMLAH BEBAN	393.461.357.290,00		393.461.357.290,00	100.00
SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASIONAL	(393.461.357.290,00)		(393.461.357.290,00)	100.00

Sumber : Laporan Keuangan Disdikpora 2019

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir (Tanjung, 2014:89)

Penerapan PSAP No. 01 belum sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan ekuitas menggambarkan keadaan ekuitas awal yang dipengaruhi oleh kenaikan ataupun penurunan ekuitas sehingga menghasilkan nilai ekuitas akhir. Pos-pos yang terdapat pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Kepemudaan

Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi adalah ekuitas awal, RK PPKD, Surplus/defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir. Tabel Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
1.01.01.01.-DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018
EKUITAS AWAL	478.032.110.345,91	478.032.110.345,91
RK PPKD	471.430.984.732,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(393.438.857.290,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF YANG MENDASAR		
JUMLAH EKUITAS AKHIR	556.024.237.787,91	956.064.220.691,82

Sumber : Laporan Keuangan Disdikpora 2019

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Standar yang ditentukan pada PSAP 04 paragraf 17 menjelaskan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi telah berpedoman pada PSAP 04 paragraf 17 dalam menyediakan informasi mengenai gambaran entitas secara umum. (Tanjung, 2014:90)

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 dengan Sistematika sebagai berikut:

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab I Pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 1.1.1 Pendapatan
 - 1.1.2 Belanja
 - 1.1.3 Transfer

1.1.4 Pembiayaan

1.2 Neraca

1.2.1 Aset

1.2.2 Kewajiban

1.2.3 Ekuitas Dana

1.3 Laporan Operasional

1.3.1 Pendapatan-LO

1.3.2 Beban-LO

1.3.3 Surplus/defisit Kegiatan Operasional

1.3.4 Surplus/defisit Kegiatan non Operasional

1.3.5 Pos Luar Biasa

1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

1.4.1 Ekuitas Awal

1.4.2 RK PPKD

1.4.3 Surplus/defisit-LO

1.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

1.4.5 Ekuitas Akhir

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

1.1 Perjanjian, Komitmen dan Kontijensi Penting

1.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

1.3 Informasi Tambahan Lainnya

4.2.4 Pembahasan

4.2.4.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Unsur-unsur yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi telah merujuk pada dengan PSAP 01 Paragraf 37. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit-LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (PSAP 01 Paragraf 37)

Namun pada tingkat SKPD, unsur-unsur tersebut tidak semuanya dapat disajikan dalam LRA SKPD. Unsur-unsur yang tidak dapat disajikan adalah : transfer, pembiayaan, dan juga sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Ketiga unsur ini tidak disajikan dalam LRA SKPD dikarenakan transfer dan pembiayaan merupakan kegiatan anggaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh SKPKD, sedangkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan neto. (Tanjung, 2014:83)

Unsur-unsur yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi berupa pendapatan, belanja, dan surplus/defisit-LRA. Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi tidak menyajikan unsur transfer, pembiayaan, dan juga sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran. Hal ini dikarenakan transfer dan pembiayaan merupakan kegiatan anggaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh SKPKD, sedangkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

PSAP 01 dalam Paragraf 38, Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Kabupaten Kuansing sudah menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan laporan ini realisasi belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp. 471.453.484.732,00 atau 85,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 548.252.137.093,74 dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Selanjutnya PSAP 01 paragraf 36, LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam pencatatan pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang mana pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan yang sah, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/daerah. Belanja berasal dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi diperoleh dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial, dan sedangkan belanja modal berasal dari belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan belanja jalan, belanja irigasi

dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Dilihat secara keseluruhan dan setelah dibandingkan dengan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan, maka dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingit telah sesuai dengan PSAP No. 01.

4.2.4.2 Analisis Neraca (N)

Dalam neraca OPD, aset yang disajikan adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan investasi jangka panjang dan dana cadangan tidak disajikan dalam neraca OPD. Hal ini disebabkan investasi jangka panjang dana cadangan merupakan disajikan pada tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini pada neraca SKPKD. Begitu juga untuk kewajiban, yang disajikan hanya kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang tidak disajikan dalam neraca OPD. Kewajiban jangka panjang disajikan pada neraca SKPKD. (Tanjung, 2014:85)

Penyajian neraca diatur dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 44 karena telah menggambarkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca juga sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 45 karena telah menyajikan sekurang-kurangnya pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana. Pos-pos yang di sajikan dalam neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas dana. Diinformasikan bahwa nilai aset

adalah sebesar Rp. 558.189.509.280,91. Kewajiban sebesar Rp. 2.165.271.493,00 sehingga ekuitas dana Tahun 2019 adalah Rp. 556.024.237.787,91.

PSAP 01 paragraf 54, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika;

- a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau
- b) Berupa kas dan setara kas

Aset lancar yang disajikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun/dua belas bulan terhitung sejak tanggal neraca. Pos aset lancar yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa Kas dan setara kas, dan kas lainnya. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp 260.528.535,00 dan Rp 260.528.535.

PSAP 01 paragraf 63 dan 64, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum, aset tetap terdiri dari ;

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, jaringan;
- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam penggerjaan.

Aset tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada PSAP 01 paragraf 63-64 yaitu menggambarkan jumlah kekayaan milik Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jumlah pada akun aset tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 539.237.986.472,30 dan Rp 459.182.901.237,00. Komponen yang terdapat pada aset tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah a) tanah, b) peralatan dan mesin, c) gedung dan bangunan, d) jalan, irigasi dan jaringan, e) aset tetap lainnya, f) konstruksi dalam penggerjaan, g) akumulasi penyusutan.

PSAP 01 paragraf 66, aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp 18.690.994.273,61 dan Rp 18.690.994.273,61 yang didapat dari komponen aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Kewajiban jangka pendek Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada PSAP 01 paragraf 77 yaitu kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang, kewajiban Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp 2.165.271.493,00 dan Rp 2.062.957.793,00 selama 1 tahun yang berasal dari utang belanja modal peralatan dan mesin dan utang belanja modal gedung dan bangunan.

Pos terakhir dalam neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah ekuitas dana. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf 84 disebutkan bahwa ekuitas kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Selanjutnya pada PSAP 01 paragraf 85 juga dijelaskan bahwa saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo ekuitas akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Komponen ekuitas dana pada laporan neraca Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 telah berpedoman pada PSAP 01 paragraf 84.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa penyajian Neraca pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 01

4.2.4.3 Analisis Laporan Operasional (LO)

Pos-pos yang disajikan pada LO Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/defisit-LO telah sesuai dengan PSAP 01 Paragraf 92, Laporan finansial mencakup Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional
- b) Beban dari kegiatan operasional
- c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;

- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit- LO (PSAP 01 Paragraf 92)

Laporan operasional Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi juga telah mengacu pada PSAP 01 paragraf 95, dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk di aplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Selanjutnya juga telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 99, menyebutkan dalam laporan operasional surplus/defisit-penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok sendiri. Berikut uraian dari pos-pos Laporan Operasional Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang telah merujuk pada PSAP 01 paragraf 95 dan 99:

Pada pos Pendapatan-LO laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan lain-lain PAD yang Sah-LO. Jumlah Pendapatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 22.500.000 dan Rp 42.418.180.000.

Beban pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya kewajiban. Terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain. Beban Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 393.461.357.290,00 dan Rp 446.777.661.467,15. Dibandingkan dengan realisasi beban tahun 2018 maka mengalami penurunan sebesar Rp 53.316.304.177,15 (Telah sesuai dengan PSAP No. 1 paragraf 99).

Pada item surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit pada laporan operasional Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 dan 2018 sebesar RP 393.438.857.290,00 dan Rp 446.777.661.467,15 atau terjadi penurunan sebesar Rp 53.338.804.177,15

Berdasarkan penjelasan diatas pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyajian Laporan Operasional sudah sesuai dengan PSAP No.01 yang mana pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan beban diakui ketika timbulnya

kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi.

4.2.4.4 Analisis Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

PSAP No. 01 Paragraf 101, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos;

- a) Ekuitas Awal
- b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar
- d) ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 menjelaskan bahwa Saldo Awal Ekuitas merupakan saldo ekuitas dana Tahun 2018. Ekuitas awal untuk Tahun 2019 sebesar Rp 478.032.110.345,91 dan ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp 795.928.488.830,67.RK PPKD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan SingingiTahun 2019 Rp 471.430.984.732,00 dan Tahun 2018 Rp 435.155.269.986,00. Surplus/Defisit Tahun 2019 sebesar Rp-393.438.857.290 dan Tahun 2018 sebesar Rp-404.359.481.467,15. Laporan Surplus/Defisit tidak dibuat tetapi Surplus/ defisit didapatkan pada Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingitidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang

terdiri dari Koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, serta koreksi ekuitas lainnya, sehingga belum sesuai dengan PSAP 01 Paragraf 101.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyajiannya belum sesuai dengan PSAP No. 01 karena tidak terdapat koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas (Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar). Namun telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 102 karena semua item yang harus disajikan oleh instansi tersebut telah disajikan dengan baik dan juga sudah dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

4.2.4.5 Analisis Catatan atas Laporan Arus Keuangan (CALK)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (PSAP 01 Paragraf 104) PSAP 01 paragraf 105, catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ringkasan isi dari CALK yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingitahun 2019 terdiri dari enam bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab kedua memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja OPD. Bab ketiga memuat informasi mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab keempat menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yg ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Bab lima berisi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab enam menjelaskan tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

CALK pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi dalam penyajiannya telah sesuai dengan PSAP No.01 yaitu semua item yang harus disajikan oleh instansi tersebut telah disajikan dengan baik dan juga sudah dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian analisis pada komponen laporan keuangan diatas, maka penulis menyimpulkan analisis penerapan PSAP No. 01 pada penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi sebagai berikut :

Tabel 4.6

Analisis Penulis Terhadap Perbandingan Unsur-unsur Laporan Keuangan yang di Tetapkan PSAP dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi

Bentuk Laporan Keuangan (Y)	Menurut PSAP	Menurut PSAP Pada OPD	Penerapan Pada Disdikpora	Kesesuaian (X)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sbb: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/deficit-LRA e. Pembiayaan f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	a.Pendapatan-LRA b. Belanja c. Surplus defisit-LRA	a.Pendapata-LRA b. Belanja c.Surplus/Defisit-LRA	100

Neraca (N)	<p>Neraca mencantumkan pos-pos berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kas dan setara kas Investasi jk. Pendek Piutang pajak dan bukan pajak Persediaan Investasi jk.panjang Aset tetap Kewajiban jk.pendek Kewajiban jk.panjang Ekuitas dana 	<ol style="list-style-type: none"> Aset lancar Aset tetap Aset lainnya Kewajiban jangka pendek Ekuitas dana 	<ol style="list-style-type: none"> Aset lancar Aset tetap Aset lainnya Kewajiban jangka pendek Ekuitas dana 	100
Laporan Operasional (LO)	<p>LO menyajikan pos-pos sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/defisit dari kegiatan operasional Pos luar biasa Surplus/defisit- LO. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Pos luar biasa Surplus/defisit- LO. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendapatan- LO Beban Surplus/defisit- LO 	100

Analisis Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sbb: a.Ekuitas awal b.Surplus/defisit-LO c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar d.Ekuitas akhir	a. Ekuitas awal b.Surplus/defisit-LO c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar d.Ekuitas akhir	a.ekuitas awal b.surplus/defisit- c.ekuitas akhir	75
Catatan atas Laporan Arus Kas (CALK)	CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLk	CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Serta mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan	CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Serta mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan	100

Keterangan	Perhitungannya
Total £X=475	
SS (Sangat Sesuai) = 80 – 100	Rata-rata = XX/Y
S (Sesuai) = 50-80	$475/5 = 95$
CS (Cukup Sesuai) = 10-50	Jadi, Kesesuaian = 95%

Sumber : Data Olahan Peneliti,2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PSAP No. 01 Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penyajian Laporan Keuangan.

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan PSAP No. 01 menggunakan basis akrual pada tahun 2015.
2. Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi secara umum sudah sesuai dengan PSAP No. 01 yang mana menyajikan komponen sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Terdapat dua komponen yang tidak sajikan yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan ini tidak disajikan karena Laporan Arus Kas merupakan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar Pemerintah Daerah. Sedangkan, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan sisa anggaran lebih Pemerintah Daerah yang mana kedua laporan ini disajikan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
4. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PSAP No. 01
5. Penyajian Neraca telah sesuai dengan PSAP No. 01
6. Penyajian Laporan Operasional telah sesuai dengan PSAP No. 01

7. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas belum sepenuhnya menerapkan PSAP No. 01 karena hanya menyajikan pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan Ekuitas Akhir. Dan tidak terdapat koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2019.
8. Penyajian Catatan atas laporan keuangan telah sesuai dengan PSAP No. 01

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

1. Untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya diharapkan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat melengkapi pos dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada komponen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) karena belum sesuai dengan PSAP 01 paragraf 101 dalam penyajian laporan keuangan.
2. Lebih mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memadai dalam pengelolaan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

3. Untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya diharapkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi agar dapat meningkatkan dalam penyajian laporan Keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai yang diamanahkan PSAP No.01
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat lebih detail dalam bagian wawancara laporan keuangan pada objek yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hery. 2016. *Laporan Keuangan : Integrated an Comprehensive Edition*. Jakarta : PT Grasindo
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Kasmir, S. M. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Setia
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Suwanda, Dadang dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD*. Banding: Alfabeta
- UNIKS. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi*. Teluk Kuantan. Universitas Islam Kuantan Singingi.

Skripsi/Jurnal :

- Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Vol 1 No 2 September, ISSN 2460-030
- Malaum, Indryani, dkk. 2018. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dalam Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan di Kabupaten Alor*. Jurnal Akuntansi Vol 5 No 3. Hal. 23-24
- Rintiani, Wasik. 2014. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. Jurnal Akuntansi Vol 3 No 1.

- Fitriani. 2017. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai*. Jurnal EMOR Vol. 2, No 1, hal 112 – 125
- Sari, Widya. 2018. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
- Suratni, Welly. 2019. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengetahuan Akuntansi Tetap Terhadap Penggunaan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
- Rahmadani, Fitri. 2015. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) NO. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subussalam*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Utara. Medan
- Widjayanti, Nicky Dwi. 2010. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Surakarta Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Yang di Ubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Trisaptya, Yulia. 2016. *Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sari, Fika Nelvi. 2019. *Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2019*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN. Batusangkar
- Yunita, Rizki Arvi. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Medan
- Maharani, Pratiwi. 2015. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Magelang Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Aldiani, Sulani. 2010. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Ratu. Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Dokumen :

Laporan Keuangan Unaudited Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singgingi 2019
Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 (Penyajian Laporan
Keuangan

BAGIAN I
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IDENTITAS PERUSAHAAN, PEWAWANCARA, DAN NARASUMBER

A. Identitas Organisasi/Perusahaan

A. 1. Nama Organisasi/Instansi	: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
A.2. Bidang Gerak Organisasi/ Instansi	: Pemerintahan
A. 3. Alamat Organisasi/ Instansi	: Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi
A.4. No. Telp/Fax	: (0760) 561600-561601-561602

B. Identitas Pewawancara

B.1. Nama	: SYAFIRA YULIA
B.2. NIM	: 160412076
B.3. Jurusan/Prodi	: Akuntansi
B.4. Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial

A. Identitas Narasumber

C.1. Nama	: IRA MAYASANDI
C.2. Jabatan	: Staf Keuangan
C.3. Instansi	: Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi

C.4. Tanda Tangan	
-------------------	--

B. Waktu Pelaksanaan

D.1. Hari/Tanggal	: 07 Juli 2020
D.2. Pukul	: 10.30 WIB
D.3. Tempat	: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuansing

BAGIAN II

HASIL WAWANCARA

A. UMUM

1. Bagaimanakah strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah penerapan PSAP No. 01 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik?
3. Apa saja kendala yang dihadapi ketika menerapkan PSAP No. 01?
4. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh instansi agar penerapan PSAP No. 01 sesuai dengan yang diharapkan?
5. Apa arti penting penerapan PSAP No. 01 bagi instansi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ?
6. Apakah peran teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?
7. Apakah kompetensi sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi pemerintahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi? Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?
2. Apakah dalam pelaksanaan SAP, petunjuk pelaksanaan atau prosedur

operasi kerja yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mudah di dapat dan dimengerti oleh para pegawai?

3. Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi juga membuat peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?

4. Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?

C. SUMBER DAYA

1. Apakah di Divisi/unit terkait telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP?
2. Apakah sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah memadai di divisi atau unit terkait?
3. Apakah pemberian wewenang di Divisi atau unit terkait telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?
4. Apakah diperlukan insentif untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?

D. KOMUNIKASI

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan?
2. Hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP?
3. Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di unit terkait?

4. Laporan apa saja yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan?
5. Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuansing menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sendiri?

E. SIKAP/DISPOSISI

1. Apakah menurut Bapak/Ibu, manfaat PSAP No. 01 dapat menghasilkan laporan keuangan dengan baik?

F. PENERAPAN PSAP NO. 01 BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Kapan Penerapan PSAP No. 01 Berbasis Akrual mulai diterapkan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi?
2. Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi sudah sepenuhnya menerapkan PSAP No. 01 basis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010? Apa saja kendala dalam pengimplementasi PSAP No. 01 basis akrual dan bagaimana bentuk serta upaya Disdikpora Kab. Kuansing dalam menanganinya?

LAMPIRAN II

Hasil Wawancara

A. UMUM

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?	Menerapkan aplikasi sistem akuntansi. Sehingga dari aplikasi ini terciptalah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2	Apakah penerapan PSAP No. 01 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik?	Sudah mulai berjalan dengan baik
3	Apa saja kendala yang dihadapi ketika menerapkan PSAP No. 01?	<ol style="list-style-type: none">1. SDM yang kurang memadai2. Jaringan atau koneksi yang buruk sehingga dapat menghambat dalam menerapkan sistem akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai SAP
4	Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh instansi agar penerapan PSAP No. 01 sesuai dengan yang diharapkan?	Kita harus mengikuti, panduan dari PSAP 01, dan laporan keuangan yang kita buat, harus sesuai dengan Peraturan yang diatur oleh Pemerintah/Bupati/Menteri.
5	Apa arti penting penerapan PSAP No. 01 bagi instansi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?	Memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas

6	Apakah peran teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?	Sangat Penting, karena dalam menyajikan laporan keuangan juga didukung dengan sistem akuntansi
7	Apakah kompetensi sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?	Jelas sangat berpengaruh, karena nantinya akan berdampak dengan laporan keuangan yang dihasilkan

B. STRUKTUR BIROKRASI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?	Seluruh unit, tapi yang lebih banyak terlibat adalah bagian keuangan
2	Apakah dalam pelaksanaan SAP, petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasi kerjanya mudah di dapat dan dimengerti oleh para pegawai?	Iya, Pegawai yang di tetapkan dalam menyusun Laporan Keuangan harus betul-betul mengerti dan cerdas dalam memahami SAP
3	Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi juga membuat peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?	Tidak, kami hanya mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah dan Bupati.
4	Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?	Menyampaikan laporan kepada atasan setiap satu bulan sekali

C. SUMBER DAYA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah di Divisi/unit terkait telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP?	Masih kurang, disdikpora mengakui bahwa mereka memiliki kualitas SDM yang kurang kompeten. Untuk sekarang ini mereka memiliki 4 orang pegawai pada bagian keuangan (Kasubag, bendahara, dan 2 orang pembantu bendahara)
2	Apakah sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah memadai di divisi atau unit terkait?	Belum, seperti koneksi internet yang tidak lancar. Laptop/software yang kurang canggih. Untuk mengatasi hal tersebut disdikpora harus mengeluarkan biaya yang tinggi, sementara mereka belum mampu.
3	Apakah pemberian wewenang di Divisi atau unit terkait telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?	Iya, Sudah sesuai
4	Apakah diperlukan insentif untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?	Perlu untuk memacu semangat kerja

D. KOMUNIKASI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan/Kepala Dinas dalam proses penyusunan pertanggungjawaban keuangan?	Kepala dinas mengawasi transaksi, terutama transaksi yang material dan bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan dengan menandatangani laporan keuangan.
2	Hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP?	Waktu yang terbatas karena sibuk

3	Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di unit terkait?	Laporan dari biro keuangan, data yang diterima dalam sistem, dan seluruh transaksi.
4	Laporan apa saja yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan?	<ul style="list-style-type: none"> -Laporan Realisasi Anggaran -Neraca -Laporan Operasional -Laporan Perubahan Ekuitas -CALK
5	Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sendiri?	Belum

E. SIKAP/DISPOSISI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah menurut Bapak/Ibu, manfaat PSAP 01 dapat menghasilkan laporan keuangan dengan baik?	Ya, sangat baik. Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

F. PENERAPAN PSAP NO. 01 BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan Penerapan PSAP No. 01 Berbasis Akrual mulai diterapkan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi	Pada tahun anggaran 2015
2	Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi sudah sepenuhnya menerapkan PSAP No. 01 basis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010?	Sudah
3	Apa saja kendala dalam pengimplementasian PSAP No. 01 basis akrual dan bagaimana bentuk serta upaya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi dalam menanganinya?	Dalam mengimplementasikan Laporan Keuangan tersebut menemui beberapa kendala, yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan, resistensi terhadap perubahan, kurangnya SDM yang berkompeten dan dukungan penuh dari pimpinan. Upayanya ialah: Kendala-kendala tersebut diharapkan adanya pengendalian internal yang memadai agar tercapainya Laporan Keuangan Basis Akrual yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan. Selain itu dibutuhkan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya bidang akuntansi pemerintah. Penyusunan kebijakan dan sosialisasi di lingkup disdikpora perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait, sehingga implementasi PSAP No. 01 Berbasis Akrual dapat berjalan dengan baik.

BIODATA

I. Data Pribadi

Nama : Syafira Yulia
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 01 Juli 1997
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Dusun Penghijauan Pasar Baru Pangean
Telepon Rumah dan HP : 082284417331
Alamat Email : syafirayulia97@gmail.com



II. Riwayat Hidup

1. Tahun 2009 Lulus MIN 1 Kuantan Singingi
2. Tahun 2012 Lulus MTsN 1 Kuantan Singingi
3. Tahun 2015 Lulus MAN 2 Kuantan Singingi
4. Tahun 2020 Lulus SI Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 05 September 2020

SYAFIRA YULIA
NPM. 160412076

